

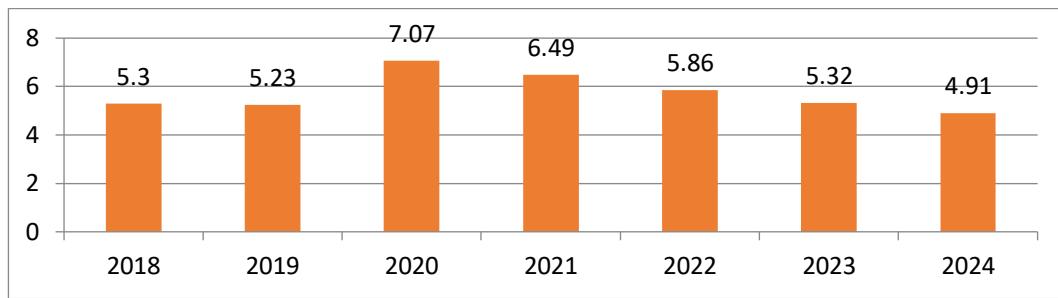
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi permasalahan pengangguran. Tingginya angka pengangguran berpotensi menurunkan kesejahteraan serta standar hidup masyarakat. Hal ini terjadi karena banyak tenaga kerja yang siap bekerja tidak terserap oleh lapangan kerja yang ada, sehingga mereka kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Kondisi pengangguran di Indonesia sejalan dengan teori umum ketenagakerjaan yang dikemukakan oleh Keynes (1936), yang menyatakan bahwa dalam perekonomian, kesempatan kerja penuh di pasar tenaga kerja sulit tercapai (Pasuria & Triwahyuningtyas, 2022).

Salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Nilai TPT mencerminkan persentase penduduk usia kerja yang termasuk kategori pengangguran (Mahroji & Nurkhasanah, 2019). Pengangguran terbuka merupakan salah satu jenis pengangguran berdasarkan karakteristiknya, yaitu kondisi di mana tenaga kerja benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Hal ini dapat terjadi karena belum memperoleh pekerjaan atau bahkan tidak berminat untuk bekerja. Faktor penyebabnya antara lain terbatasnya lapangan kerja atau ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan jenis pekerjaan yang tersedia (Hidayah & Aji, 2022). Besarnya tingkat pengangguran terbuka di Indonesia dari tahun 2018-2024 terlihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

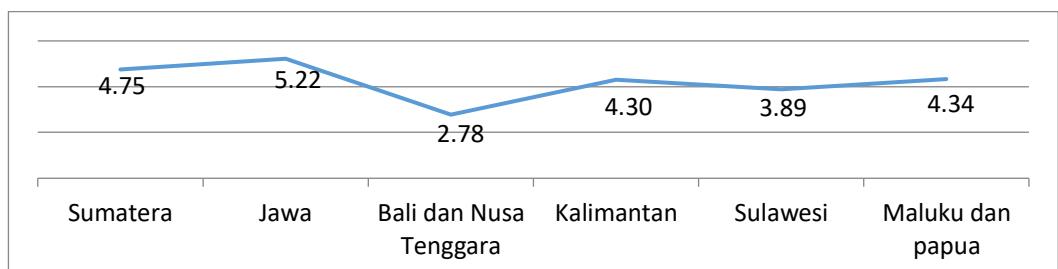


Sumber : BPS Indonesia (data diolah), 2025

Gambar 1.1 Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia (Persen)

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2018 ke 2019 tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mengalami penurunan dari 5.3% menjadi 5.2% dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 7.07% terjadi pada awal pandemi covid-19, kemudian sampai tahun 2024 terus mengalami penurunan hingga 4.91%.

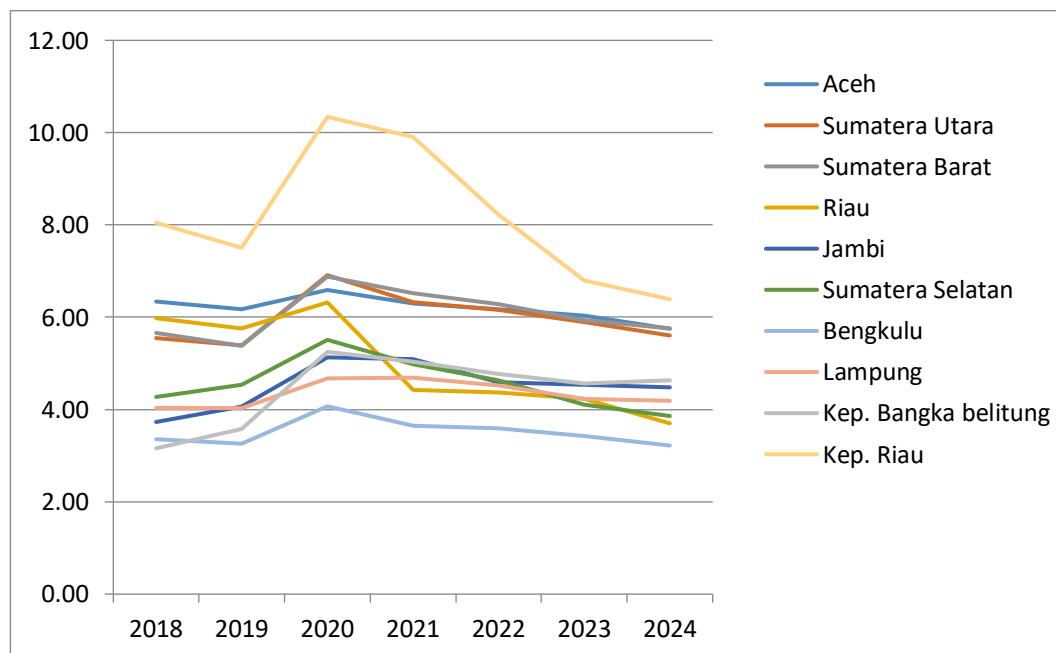
Pengangguran merupakan persoalan yang dihadapi hampir di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali Pulau Sumatera. Pulau ini, yang menempati urutan keenam terbesar di dunia dengan luas 473.481 km², memiliki jumlah penduduk yang cukup besar sehingga turut menghadapi tantangan serupa, yaitu pengangguran (Muhgni *et al.*, 2020). Dari gambar 1.2 dapat dilihat tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 pada pulau-pulau besar di Indonesia:



Sumber: BPS Indonesia (data diolah), 2025

Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka pada Pulau-pulau Besar di Indonesia (Persen)

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat dalam lingkup yang lebih kecil persentase tingkat pengangguran antarpulau tidak sama atau masih terdapat disparitas antarwilayah di Indonesia. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi di Pulau Jawa dengan tingkat pengangguran sebesar 5,22%, sementara tingkat pengangguran terendah tercatat pada Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan tingkat pengangguran hanya sebesar 2,78%. Sedangkan Pulau Sumatera tingkat penganggurannya sebesar 4.75%, merupakan tertinggi kedua setelah Pulau Jawa. Tingginya tingkat pengangguran di Pulau Sumatera menunjukkan kondisi makro yang buruk pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Besarnya tingkat pengangguran terbuka dari 10 provinsi di pulau Sumatera tahun 2018-2024 terlihat pada Gambar 1.3 berikut:



Sumber: BPS Indonesia (data diolah), 2025

Gambar 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka tiap Provinsi di Pulau Sumatera (Persen)

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka pada 10 provinsi di pulau Sumatera pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami fluktuasi. Berdasarkan gambar juga dapat diketahui bahwa terdapat 4 dari 10 provinsi di Pulau Sumatera memiliki TPT di atas level nasional pada tahun 2024, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, provinsi yang memiliki TPT lebih rendah dibandingkan TPT nasional adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Bengkulu.

Bagi provinsi yang memiliki tingkat pengangguran tinggi, persoalan pengangguran perlu ditangani secara tepat agar jumlah pengangguran dapat menurun. Sementara itu, di provinsi dengan tingkat pengangguran rendah, masalah ini juga tetap harus segera diatasi guna mencegah peningkatan jumlah pengangguran. (Karisma *et al.*, 2021).

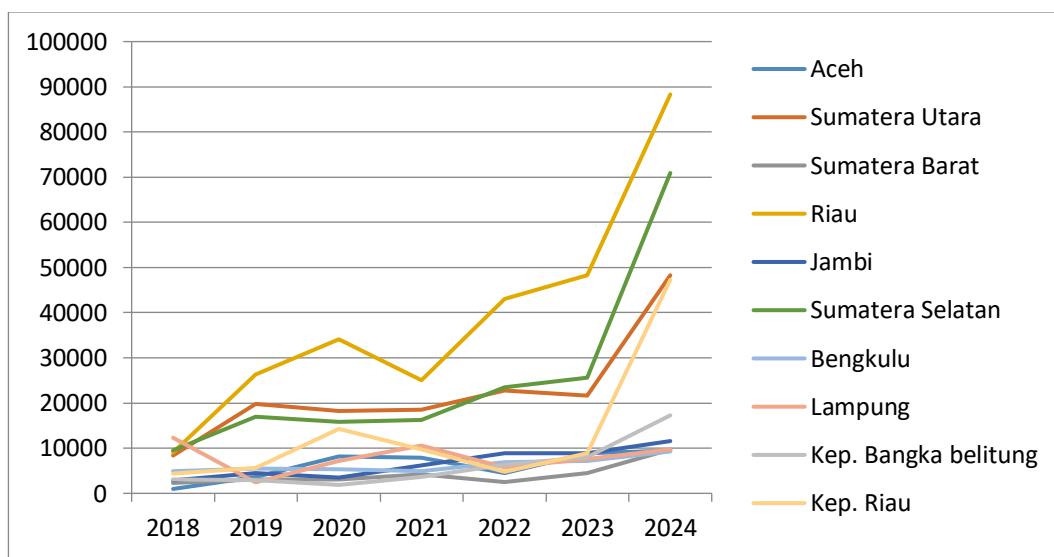
Perbedaan tingkat pembangunan antarwilayah dapat dipengaruhi oleh investasi dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka. Wilayah yang lebih maju cenderung menerima lebih banyak investasi dan memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah, sedangkan wilayah yang kurang berkembang sering menghadapi kendala dalam menciptakan lapangan kerja.

Perkembangan TPT tidak lepas dari berbagai faktor dan kebijakan yang mempengaruhinya. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah Investasi, Indeks Pembangunan Manusia

(IPM), dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Investasi yang semakin tinggi maka akan semakin besar mempengaruhi rendahnya pengangguran. Sebaliknya jika jumlah investasi menurun maka tingkat pengangguran akan meningkat (Hidayah & Aji, 2022). Peningkatan IPM yang dapat disebabkan oleh faktor pendidikan, kesehatan dan daya beli. Ketika faktor tersebut meningkat dan terus mengalami peningkatan perbaikan maka kualitas manusia atau masyarakat akan mengalami peningkatan yang relatif baik sehingga peningkatan kualitas dan kemampuan penduduk akan mengurangi jumlah pengangguran. Upah yang tinggi akan mempengaruhi biaya produksi dan akibatnya perusahaan akan melakukan efisiensi yaitu dengan melakukan pengurangan tenaga kerja sehingga pengangguran akan meningkat (Ahmad Sahlan Hadi & Riani, 2022).

Keynes berpendapat bahwa pengangguran tidak bisa dihapuskan sepenuhnya, namun dapat dikurangi. Upaya pengurangan tersebut dapat dilakukan dengan memperluas kesempatan kerja, yang memerlukan modal, dan modal tersebut diperoleh melalui investasi (Chandra et al., 2020). Sukirno (2011) menjelaskan bahwa investasi adalah penanaman modal, yaitu pengeluaran perusahaan untuk memperoleh perlengkapan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Sementara itu, teori Harrod-Domar dalam Stefanus (2017) menyatakan bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi. Dengan kapasitas produksi yang semakin besar, dibutuhkan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak, dengan asumsi kondisi full employment (Helvira & Rizki, 2020).

Investasi adalah pengeluaran barang yang tidak dikonsumsi saat ini dimana berdasarkan periode waktunya, investasi terbagi menjadi tiga diantaranya adalah investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang (Rahmah *et al.*, 2024). Berikut dapat dilihat besarnya jumlah investasi tiap provinsi di pulau sumatera dari tahun 2018-2024 (Milyar Rupiah):



Sumber : BPS Indonesia dan BKPM RI (data diolah), 2025

Gambar 1.4 Realisasi Investasi tiap Provinsi di Pulau Sumatera (Milyar Rupiah)

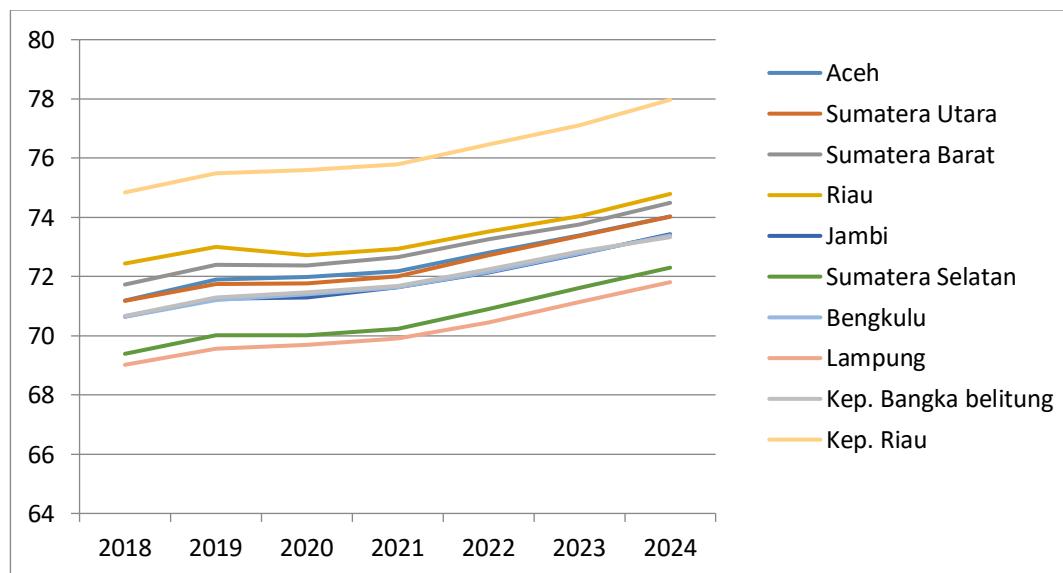
Berdasarkan gambar di atas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2018 sampai 2024 investasi tiap provinsi di pulau Sumatera mengalami fluktuasi. Terdapat lonjakan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun terutama pada tahun 2024 terjadi peningkatan lebih dua kali lipat dibanding 2023 pada beberapa provinsi. Pada tahun 2024 jumlah investasi paling tinggi yaitu di provinsi Riau dengan nilai 88.297,7 miliar rupiah dan tingkat investasi terendah terdapat pada tahun 2024 yaitu di provinsi Bengkulu dengan nilai 9.283,5 miliar rupiah.

Investasi yang difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat meningkatkan IPM. Contohnya, investasi di bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya mendorong peningkatan produktivitas dan penurunan angka pengangguran. Sementara itu, investasi pada infrastruktur dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat. IPM sendiri memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan sosial dan ekonomi suatu negara, sekaligus memungkinkan perbandingan antarnegara dalam hal pencapaian pembangunan manusia (Simbolon *et al.*, 2023).

Badan Pusat Statistik Indonesia (2020) mendefinisikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator komposit yang digunakan untuk menilai pencapaian pembangunan kualitas hidup manusia. IPM disusun dari rata-rata capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur melalui angka harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan dilihat dari rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah bagi penduduk berusia 7 tahun. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur berdasarkan pengeluaran ril per kapita yang telah disesuaikan. Peran IPM sebagai tolak ukur pembangunan suatu negara sangatlah penting. Dalam era globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, setiap negara berupaya meningkatkan IPM untuk dapat bersaing di tingkat internasional sekaligus memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakatnya (Simbolon *et al.*, 2023).

Napitupulu (2007) dalam Mahroji & Nurkhasanah (2019) menyatakan bahwa semakin baik kondisi kesehatan tenaga kerja, tingkat pengetahuan yang dimiliki, serta kemampuan untuk menjalani hidup yang layak, maka kualitas dan hasil pekerjaannya akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika kondisi tenaga kerja buruk, maka hasil pekerjaannya cenderung rendah atau tidak berkualitas. Hal ini menegaskan bahwa tiga dimensi utama pembangunan manusia menjadi indikator penting untuk menilai kualitas sumber daya manusia yang siap bekerja, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan tingkat pengangguran di suatu daerah.

Perkembangan besarnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 10 provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2018 sampai tahun 2024 terlihat pada gambar 1.5 berikut ini:



Sumber : BPS Indonesia, 2025

Gambar 1.5 Indeks Pembangunan Manusia tiap Provinsi di Pulau Sumatera (Poin)

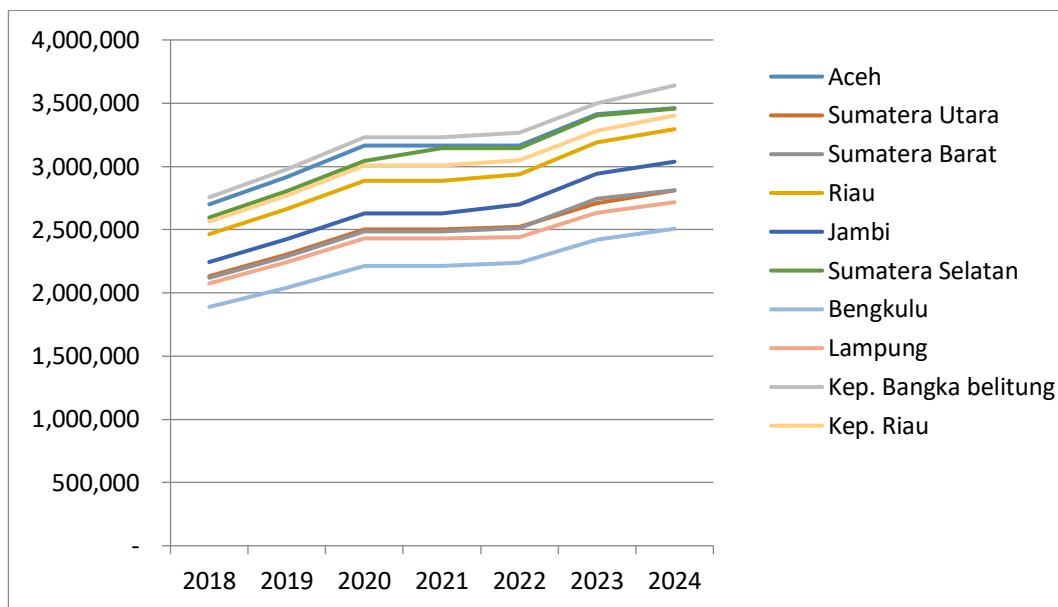
Dari gambar 4.4 dapat diketahui bahwa indeks pembangunan manusia pada 10 provinsi di pulau Sumatera cenderung mengalami peningkatan di setiap

tahunnya kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan di provinsi Sumatera barat, Riau, dan Sumatera selatan yang disebabkan karna adanya covid-19, kemudian kembali mengalami peningkatan sampai tahun 2024. Indeks pembangunan manusia paling tinggi yaitu di provinsi Kepulauan riau pada tahun 2024 sebesar 77,97 poin dan indeks pembangunan terendah di provinsi Lampung sebesar 71,81 poin, dikarenakan provinsi Lampung masih menghadapi berbagai tantangan seperti distribusi layanan dasar masih belum merata, rata-rata lama sekolah masih dibawah rata-rata nasional, dan tidak sedikit guru di daerah tertinggal bekerja dengan sarana dan dukungan minim, serta pendapatan yang masih rendah.

Selain investasi dan indeks pembangunan manusia, upah minimum juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi tingkat pengangguran. Berdasarkan teori umum ketenagakerjaan Keynes (1936), pengangguran terjadi karena penerapan upah efisiensi, yaitu kondisi ketika upah berada di atas tingkat keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Hal ini menyebabkan berkurangnya perputaran tenaga kerja, yang pada akhirnya menimbulkan masalah pengangguran (Pasuria & Triwahyuningtyas, 2022).

Upah tenaga kerja memiliki peran penting bagi kedua belah pihak. Bagi produsen, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi yang perlu ditekan agar lebih efisien. Sementara itu, bagi pekerja, upah menjadi sumber pendapatan bagi dirinya dan keluarganya, sekaligus menjadi bagian dari perputaran ekonomi masyarakat (Chandra et al., 2020). Penetapan tingkat upah oleh pemerintah dapat memengaruhi besarnya tingkat pengangguran. Tinggi

rendahnya upah berkaitan dengan pribadi pekerja, harga diri, serta status sosial di masyarakat, dan menjadi faktor penting yang menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Kiha *et al.*, 2021). Berikut tingkat upah minimum 10 provinsi di pulau Sumatera dari tahun 2018 sampai 2024:



Sumber : BPS Indonesia dan satudata kemnaker (data diolah), 2025

Gambar 1.6 Upah Minimum tiap Provinsi di Pulau Sumatera (Rupiah)

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa upah minimum tiap provinsi di pulau sumatera dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami peningkatan, dan dari tahun 2020 sampai 2021 upah minimum tiap provinsi di pulau sumatera tidak berubah kecuali di provinsi Bengkulu dan sumatera selatan mengalami peningkatan, kemudian pada tahun 2022 upah minimum tiap provinsi di pulau sumatera meningkat kecuali di provinsi sumatera selatan, kemudian mengalami peningkatan sampai 2024 pada tiap provinsi. Hal ini bertolak belakang dengan teori yang disampaikan dalam penelitian Ahmad Sahlan Hadi & Riani, (2022) dan Pasuria & Triwahyuningtyas, (2022) yang menyatakan bahwa jika ketetapan upah

minimum di suatu wilayah meningkat maka akan mempengaruhi biaya produksi dan akibatnya perusahaan akan melakukan efisiensi yaitu dengan mengurangi tenaga kerja sehingga pengangguran akan meningkat.

Pulau Sumatera memiliki potensi ekonomi yang besar, namun masih dihadapkan pada tantangan serius berupa pengangguran terbuka. Meski memiliki beragam sektor ekonomi, seperti perkebunan, pertambangan, dan industri manufaktur, masalah pengangguran terbuka tetap menjadi hambatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ketimpangan antara tingkat investasi dan pemerataan pengembangan sumber daya manusia (SDM) turut menjadi faktor penyebab tingginya pengangguran di sejumlah provinsi di Sumatera.

Belum terdapat penelitian yang menggabungkan variabel investasi, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum dalam mengkaji pengaruhnya terhadap pengangguran di Pulau Sumatera. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya meneliti pengaruh ketiga variabel tersebut secara terpisah terhadap tingkat pengangguran. seperti penelitian yang dilakukan oleh (Muhgni *et al.*, 2020) yang menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap pengangguran di pulau Sumatera. Penelitian (Fahmi *et al.*, 2023) yang menganalisis pengaruh inflasi, IPM, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di pulau sumatera. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Syahputra *et al.* (2019) yang menganalisi pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi-Provinsi di Sumatera. Dan

penelitian yang dilakukan oleh Manihuruk *et al.* (2024) yang menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum terhadap pengangguran di pulau Sumatera.

Dengan melihat latar belakang masalah diatas membuat penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh “Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum terhadap Pengangguran di Pulau Sumatera”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat disimpulkan masalah sebagai berikut :

1. Berapa besar pengaruh Investasi terhadap Pengangguran tiap provinsi di pulau sumatera?
2. Berapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pengangguran tiap provinsi di pulau sumatera?
3. Berapa besar pengaruh Upah Minimum terhadap Pengangguran tiap provinsi di pulau sumatera?
4. Berapa besar pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum terhadap Pengangguran tiap provinsi di pulau Sumatera

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Investasi terhadap Pengangguran tiap provinsi di pulau Sumatera

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pengangguran tiap provinsi di pulau Sumatera
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Upah Minimum terhadap Pengangguran tiap provinsi di pulau Sumatera.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum terhadap Pengangguran tiap provinsi di pulau Sumatera

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran kepada pembaca mengenai bagaimana Pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum terhadap Pengangguran.
2. Hasil penelitian ini akan memperkaya literatur ilmiah, memperdalam teori karena penulisan ini dilakukan dari sumber referensi terpercaya dan dapat berguna untuk kegiatan akademik bagi peneliti sendiri dan peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang di harapkan dalam hasil penelitian ini adalah:

1. Sebagai referensi dan acuan peneliti selanjutnya, yang ingin mengembangkan penelitian di bidang pengaruh investasi, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum provinsi
2. Penelitian ini bersifat kuantitatif berupa angka dan data sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah serta masukan bagi pengembangan ilmu ekonomi dan studi pembangunan lainnya.